

ABSTRAK

Kasus Maria Pauline Lumowa dapat digolongkan pada tindak pidana pencucian uang yang melanggar ketentuan Hukum Pidana Nasional Indonesia sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kasus ini berbeda dengan biasanya, dimana pada umumnya proses ekstradisi dilakukan dengan adanya perjanjian ekstradisi terlebih dahulu antar negara yang terlibat (*requesting state* dan *requested state*). Hal tersebut diperparah dengan adanya perbedaan penerapan yurisdiksi teritorial antar negara, ditambah adanya fakta bahwa ia memiliki dwi kewarganegaraan Belanda sejak 1979 yang mengakibatkan kasus ini memiliki perjalanan panjang dengan rentang waktu selama kurang lebih 18 tahun.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Kasus di atas dideskripsikan dan dianalisis menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukumnya berasal dari konvensi dan peraturan perundang-undangan seperti Konvensi Palermo 2000, Konvensi UNCAC 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan lain-lainnya yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa NCB Interpol memiliki peran sentral dalam proses penerbitan *Interpol Notices* dimana *Interpol Notices* yang diterbitkan oleh NCB Interpol merupakan dasar dan permulaan daripada keseluruhan proses pelaksanaan ekstradisi. Pada prosesnya NCB Interpol tidak hanya harus berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga aparat penegak hukum di Negara asal NCB-nya saja, namun harus ada juga koordinasi dengan pihak-pihak eksternal Negara diminta (*requested state*) dalam hal ini seperti NCB Negara diminta beserta stakeholder terkaitnya seperti Otoritas Pusat dan/atau Kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukumnya.

Kata Kunci: Peran NCB-Interpol, *Handing Over*, Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

ABSTRACT

Maria Pauline Lumowa's case can be classified as a crime of money laundering which violates the provisions of the Indonesian National Criminal Law as regulated in Law Number 25 of 2003 concerning the Crime of Money Laundering. This case is different from usual, where in general the extradition process is carried out with the prior extradition agreement between the countries involved (requesting state and requested state). This is exacerbated by the differences in the application of territorial jurisdiction between countries, plus the fact that he has dual Dutch citizenship since 1979 which resulted in this case having a long journey spanning approximately 18 years.

This legal writing's done by a normative juridical approaching with analytical descriptive research specifications. The cases above are described and analyzed using primary data and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material comes from conventions and legislation such as the Palermo Convention 2000, UNCAC Convention 2003, Law No.1 / 1979 on Extradition and the others which are then analyzed using qualitative data analysis methods.

From the results of this study it can be concluded that NCB Interpol has a central role in the process of publishing Interpol Notices where the Interpol Notices issued by NCB Interpol are the basis and initiation of the entire extradition implementation process. In the process, the Interpol NCB must not only coordinate with Ministries and law enforcement agencies in the NCB country of origin, but there must also be coordination with external parties from the requested state in this case such as the requested State NCB and related stakeholders such as Central Authority and / or related Ministries such as the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Law.

Keywords: *Role of NCB-Interpol, Handing Over, Extradition of Maria Pauline Lumowa*